

Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Jambi Dalam Penerapan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Jambi

Ali Topan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : alitopan97at@gmail.com

Sissah Sissah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : sissah_mhi@yahoo.co.id

Nurfitri martaliah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : nmartaliah@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: alitopan97at@gmail.com*

Abstract. One of the government's efforts to overcome ongoing social protection problems is to encourage the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). The development of MSMEs, especially in Jambi City, has experienced a very large increase, namely 47,813 in 2021 and increased drastically in 2022, namely 50,747. This means that the development of MSMEs in Jambi City has increased by 6.13%. This increase is an effort by the Jambi Provincial Government to encourage the development of MSMEs by synchronizing MSME empowerment programs in each district and city. This research aims to determine the role of Bank Indonesia Jambi Regional Representative Office (Kpw) in implementing inclusive finance in Jambi City MSMEs. This research uses a qualitative approach which is a type of analysis that produces findings that cannot be obtained using statistical methods or other quantitative techniques where Jambi City MSMEs are the object of this research. The research results show that the role of Bank Indonesia KPw Jambi in implementing inclusive finance for Jambi MSMEs is providing information and facilitators in the socialization of inclusive finance, providing knowledge in inclusive financial education and monitoring and evaluating socialization and education activities. Meanwhile, Bank Indonesia KPw Jambi's obstacles in implementing inclusive finance for Jambi MSMEs consist of unequal reach or accessibility and Human Resources (HR) and understanding of the audience.

Keywords: Bank Indonesia, MSMEs and Inclusive Finance

Abstrak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan perlindungan sosial yang sedang berlangsung adalah dengan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). perkembangan UMKM khususnya di Kota Jambi telah mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sebanyak 47.813 ditahun 2021 dan meningkat drastis di tahun 2022 yaitu sebanyak 50.747. itu berarti perkembangan UMKM di Kota Jambi telah meningkat sebesar 6,13%. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jambi mendorong pengembangan UMKM dengan menyinkronkan program pemberdayaan UMKM di setiap kabupaten dan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah (Kpw) Jambi Dalam Penerapan Keuangan Inklusif Pada UMKM Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan jenis analisis yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau teknik kuantitatif lainnya dimana UMKM Kota Jambi menjadi objek dan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia KPw Jambi dalam penerapan keuangan inklusif UMKM Jambi yaitu menyediakan informasi dan fasilitator dalam sosialisasi keuangan inklusif, menyediakan pengetahuan dalam edukasi keuangan inklusif dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi dan edukasi. Sedangkan Kendala Bank Indonesia KPw Jambi dalam penerapan keuangan inklusif UMKM Jambi terdiri dari ketidakmerataan jangkauan atau aksesibilitas dan sumber Daya Manusia (SDM) dan pemahaman terhadap audiens.

Kata kunci: Bank Indonesia, UMKM dan Keuangan Inklusif

LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan seperti bank dan yang bukan bank memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat mana pun, seluruh masyarakat Penghasilan besar atau kecil dalam mendukung usahanya, dan salah satu masalah bagi pengalaman sebagian besar negara, termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Di Indonesia banyak seminar dan pertemuan telah diadakan pengentasan kemiskinan, salah satunya menciptakan kondisi bagi orang untuk mengakses lembaga keuangan untuk semua.

Perkembangan perekonomian suatu negara akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi adalah perkembangan finansial. Seiring dengan pertumbuhan keuangan suatu negara, hal tersebut berdampak positif terhadap determinan keuangan inklusif. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi dimana seluruh anggota masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal dengan berbagai kualitas secara tepat waktu, transparan, dan aman dengan biaya yang wajar. dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan moralitasnya. Inklusi keuangan adalah setiap upaya dilakukan untuk menghapus semua ini menjadi kendala bagi masyarakat penggunaan jasa keuangan, yaitu termasuk Keuangan juga merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan, keseimbangan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Dalam hal pengembangan jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan OJK mempunyai peran penting terhadap pelaksanaan dan pengawasa regulasi sektor keuangan di Indonesia. Bahkan ketiga institusi tersebut telah memiliki suatu suara terkait dengan sinergi peran jasa keuangan dan pengentasan kemiskinan. Perluasan penggunaan jasa keuangan diyakini berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dengan meningkatnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat terhadap jasa keuangan maka tingkat kemiskinan akan menurun dan peningkatan keuangan akan terjadi, pada akhirnya akan bermuara pada perkembangan perekonomian suatu daerah/negara.

Tepat sejak krisis mata uang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998, bangsa Indonesia mengalami guncangan hebat di berbagai bidang baik ekonomi, sosial dan budaya. Sebab, krisis yang terjadi bersifat multidimensi yang berdampak pada meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan melebarnya ketimpangan lintas sektor, pelaku, dan wilayah. Selain itu, banyak perusahaan besar dan lembaga keuangan seperti bank bangkrut, menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan perlindungan sosial yang sedang berlangsung adalah dengan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM). Inilah poin yang diminati oleh beberapa negara berkembang, bahkan negara maju juga memperhatikan peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM saat ini tengah menjadi sorotan di dunia startup saat ini. Dari kegiatan awal seperti menu sarapan, baju kerja, snack siang dan masih banyak kebutuhan lainnya, sebagian besar menggunakan produk UMKM. Ragam produk yang dihasilkan UMKM juga cukup beragam sehingga sektor ini tergolong ekonomi kreatif. Selain aspek produk, keberadaan UMKM juga mempengaruhi dinamika perekonomian nasional, karena terciptanya masyarakat yang produktif dan kesempatan kerja juga meningkat.

Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan peningkatan pengembangan UMKM dan modernisasi koperasi. Peran UMKM sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jumlahnya mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan penciptaan lapangan kerja 96,9% dari total lapangan kerja nasional. Sebelumnya, kesehatan UMKM dalam negeri menurun selama dua tahun pertama pandemi Covid-19, tepatnya pada 2020-2021. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh UNDP dan LPEM UI terhadap 1.180 UMKM yang diwawancarai, diperoleh hasil bahwa saat itu lebih dari 48% UMKM bermasalah dengan bahan baku, 77% pendapatan menurun, 88% produk UMKM menurun. . permintaan, bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai asetnya.

Total kontribusi ekspor UMKM akan meningkat dari 14,37% pada tahun 2020 menjadi 15,69% pada tahun 2021. Salah satu upaya peningkatan daya saing UMKM adalah memanfaatkan peluang untuk berintegrasi ke pasar global melalui rantai nilai global dan *global e.-commercial chain* (GEC). Integrasi UMKM ke dalam rantai nilai global dapat berupa ekspor tidak langsung melalui perusahaan umum domestik atau afiliasi asing.

Oleh karena itu, tantangan UMKM ke depan perlu disikapi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, *financial key*, *brand image* dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembangunan, pelatihan dan fasilitas serta *database tunggal*.

Pertumbuhan UMKM masih terkendala oleh beberapa masalah, yaitu dilihat dari dua faktor. Pertama, elemen internal, yaitu lebih sedikit modal, produksi, pemasaran dan pasokan kekuatan manusia. Kedua, faktor eksternal berupa permasalahan yang timbul dari para pihak pembina dan pembina UMKM. Karena memecahkan masalah khusus ini modal dan pemasaran, ada model bernama "Integrasi Keuangan". Namun, penggunaan model ini masih sangat rendah di kalangan masyarakat Indonesia. Hasil Survei Neraca Rumah Tangga yang dilakukan oleh

Bank Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 62% rumah tangga baik konsumsi maupun produksi tidak memiliki tabungan. Menurut Bank Dunia, situasi tersebut juga terjadi di pedesaan bahkan lebih parah. Pemanfaatan lembaga keuangan oleh masyarakat masih sangat terbatas, terutama untuk pertumbuhan usaha mereka (UMKM).

UMKM mampu membuktikan diri sebagai solusi di tengah krisis ekonomi tahun 1998, saat sebagian besar industri melemah, namun semua itu dapat diatasi dengan penerapan solusi UMKM. Hal ini ternyata dapat menjadi keuntungan bagi UMKM karena produk yang diproduksi merupakan produk yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Selain itu, dari segi permodalan, UMKM juga dapat beroperasi dengan modal sendiri tanpa bergantung pada dukungan modal dari luar. Terkait kebutuhan bahan baku, UMKM seringkali menggunakan sumber bahan baku alami, bukan impor. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya membuat UMKM tahan terhadap guncangan krisis ekonomi. Namun disamping keunggulan UMKM dan kemampuannya bertahan menghadapi krisis ekonomi, UMKM masih memiliki tantangan baru yaitu bersaing di pasar global. Memang, beberapa UMKM Indonesia berakar pada bisnis keluarga, yang menjalankan bisnis dengan cara tradisional dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah pencatatan keuangan sebagai bentuk data pelaporan perbaikan bisnis. Sering terjadi keuangan bekas masih tertukar dengan keuangan pribadi. Hal ini nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan pengembangan usaha. Karena mereka tidak dapat membedakan keuangan dari pendapatan yang dapat dinikmati dan keuangan dari akun modal harus digunakan untuk mengembangkan bisnis.

Di sisi lain, UMKM start-up terkadang masih belum memiliki sistem keuangan yang baik. Karena mereka lebih fokus pada pengolahan dan pemasaran produk. Selain itu, kendala dan tantangan UMKM dalam persaingan yang semakin ketat saat ini adalah permodalan. Menurut beberapa pendapat, UMKM kecil kemungkinannya untuk tumbuh karena kurangnya modal dalam usaha yang sedang berkembang. Sementara itu, kekurangan permodalan disebabkan karena UMKM tidak mendapatkan dukungan finansial sehingga UMKM tidak dapat memperoleh pinjaman bank. Ini merupakan tantangan baru bagi UMKM untuk memungkinkan bank meningkatkan ekonomi usahanya. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut perlu dilakukan pembinaan dan edukasi kepada pelaku UMKM keuangan. Ini dapat digunakan dalam berbagai cara, seperti mengumpulkan dana dengan meminjamkan ke bank atau pemberi pinjaman lain, dan biasanya membutuhkan setidaknya satu tahun laporan keuangan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai catatan kemajuan usaha yang telah dilakukan sehingga dapat mengevaluasi seberapa efektif kinerja yang telah dicapai dan dapat menetapkan target pendapatan ke depan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari badan pusat statistik mengenai jumlah UMKM yang ada di Provinsi Jambi dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi dapat dilihat pada ringkasan tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM di Provinsi Jambi tahun 2021-2022

No	Wilayah	Jumlah	
		2021	2022
1	Kerinci	12.400	7.468
2	Merangin	4.956	6.121
3	Sarolangun	3.705	2.627
4	Batanghari	12.796	17.611
5	Muaro Jambi	42.105	41.234
6	Tanjung Jabung Timur	19.046	8.698
7	Tanjung Jabung Barat	8.390	19.046
8	Tebo	1.268	8.370
9	Bungo	3.387	12.489
10	Kota Jambi	47.813	50.747
11	Kota Sungai Penuh	9.631	9.631

Sumber : Data Bps, www.bps.go.id

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa perkembangan UMKM khususnya di Kota Jambi telah mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sebanyak 47.813 ditahun 2021 dan meningkat drastis di tahun 2022 yaitu sebanyak 50.747. itu berarti perkembangan UMKM di Kota Jambi telah meningkat sebesar 6,13%. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jambi mendorong pengembangan UMKM dengan menyinkronkan program pemberdayaan UMKM di setiap kabupaten dan kota. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jambi adalah mendorong pengembangan UMKM sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat Jami dan mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah Sementara Jambi juga terus memantau dan mengevaluasi perkembangan UMKM melalui Forum Organisasi Darah (OPD). Sinkronisasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan UMKM antara Pemerintah Sementara Jambi dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, kendala yang dihadapi dalam memperluas keuangan inklusif dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kendala yang dihadapi masyarakat dan lembaga keuangan perbankan. Bagi masyarakat, kendala yang dihadapi seperti kurangnya edukasi yang diterima tentang jasa keuangan perbankan, adanya regulasi atau *business process* yang menghambat akses masyarakat, serta jarak antara masyarakat dengan lembaga keuangan yang sulit untuk dijangkau. Adapun kendala yang dihadapi lembaga keuangan perbankan yakni adanya keterbatasan cakupan wilayah dalam memperluas jaringan kantor yang dimana lokasi Bank lebih banyak di pusat kota sedangkan banyak masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang berada di daerah-daerah terpencil. Di sisi lain untuk memperluas jaringan kantor di daerah-daerah terpencil, 3 lembaga

keuangan perbankan dihadapkan pada masalah biaya yang relatif mahal. Sehingga program *Branchless Banking* diharapkan mampu menjembatani kendala tersebut untuk mendekatkan masyarakat khususnya yang jauh dari kantor Bank kepada pelayanan perbankan. Menurut situs Bank Indonesia, inklusi keuangan mulai diperkenalkan kepada masyarakat dunia pasca krisis tahun 2008 dan terus berkembang sampai saat ini. Inklusi keuangan didasari oleh kehidupan masyarakat kelompok bawah (*in the bottom of the pyramid*) yang jumlahnya cukup besar dan paling terkena dampak dari krisis tersebut. Pemrakarsa inklusi keuangan bermaksud membela masyarakat kelompok bawah dengan memberdayakannya dalam aktivitas kehidupan ekonomi bukan dengan bantuan dana atau pangan yang selama ini dilakukan.

Permasalahan dan kendala yang sedang dialami penerapan kebijakan keuangan inklusif KPw Jambi, salah satunya adalah jarak tempat tinggal masyarakat didaerah dengan bank atau layanan jasa keuangan, selain itu biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan rekening awal dinilai cukup mahal untuk mewujudkan program keuangan inklusif yang berkesinambungan diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dengan kementerian dan insitusi terkait dalam rangka pengembangan, penetapan prioritas dan pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Dengan koordinasi yang baik diharapkan tujuan peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dapat tercapai.

Dalam wawancara dengan Bapak Evan Fareira, salah satu pegawai Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Jambi Mengatakan bahwa “kebijakan dan penerapan keuangan inklusif sangat membantu roda perekonomian masyarakat, mempermudah masyarakat untuk bertransaksi non tunai melalui perbankan, dan juga yang sangat penting adanya keuangan inklusif memberi dampak positif pada masyarakat pelosok yang juga merasakan kemudahan bertransaksi non tunai, selain itu banyak kemudahan-kemudahan lain yang di dapat dengan penerapan kebijakan ini“ Sebenarnya, menyebarkan literasi keuangan Islam ke semua pihak dan menggunakannya secara efektif dapat memberikan hasil yang positif. Dalam hal ini, salah satunya melalui pendampingan pelaku usaha UMKM dapat menghasilkan *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Tingginya jumlah pasar UMKM di Indonesia akan dapat meningkatkan penggunaan barang syariah sehingga mendorong keberadaan lembaga keuangan syariah dan sistem keuangan syariah. Topik ini bermanfaat bagi pelaku bisnis yang perlu memahami lembaga keuangan syariah dan produk syariah yang dapat digunakan oleh UMKM. Karena tujuan keuangan syariah yaitu memberikan keuntungan dan meningkatkan produktivitas sejalan dengan tujuan pelaku usaha.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan judul “Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah (Kpw) Jambi Dalam Penerapan Keuangan Inklusif (Studi Kasus UMKM Kota Jambi)”.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian UMKM

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut : Usaha mikro adalah usaha yang berhasil dijalankan oleh perorangan atau badan usaha kecil dan memenuhi kriteria tertentu disebut usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usaha kecil yang memenuhi persyaratan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terintegrasi baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Pengertian Keuangan Inklusif

Inklusi keuangan digambarkan sebagai: “Setiap orang berhak mendapatkan akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau, dengan penuh penghormatan terhadap martabatnya.” Hal ini sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Semua kelompok masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan orang yang tinggal di pedesaan mendapat perhatian khusus.

Setiap anggota masyarakat harus memiliki akses ke berbagai layanan keuangan formal berkualitas tinggi secara tepat waktu, aman, dan hemat biaya untuk keberadaan keuangan inklusif.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai analisis kualitatif, adalah jenis analisis yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau teknik kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk mengkaji keberadaan manusia, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan, menurut Strauss dan Corbin dalam buku Farida. Bogdan dan Taylor juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa suara, tulisan, dan perilaku manusia dalam

buku Farida. orang yang diperhatikan. Melalui penggunaan penalaran induktif, dimungkinkan untuk menangkap realitas melalui studi kualitatif ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian, sering juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa, atau tempat dimana aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kota Jambi dan Bank Indonesia.

C. Jenis dan sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dan memerlukan pengelolaan lebih lanjut oleh penelitian. Data primer ini juga biasa disebut dengan data baru atau data asli. Sumber data primer meliputi:

- 1) *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan informan.
- 2) *Place*, yaitu data yang diperoleh dari gambaran tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- 3) *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol lain.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil informasi darinya. Dalam penelitian ini, data didapat dari mewawancarai beberapa orang yang telah melakukan transaksi jual beli *virtual account* dengan sistem *Real Money Trading* di *game Mobile Legends* Dalam wawancara ini peneliti menanyakan tentang bagaimana proses dan mekanisme dari jual beli *virtual account* dengan sistem *Real Money Trading* di *game Mobile Legends* tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari referensi lain selain sumber primer yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder dapat dikumpulkan dari jurnal, buku cetak, *e-book* dan sumber pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka interpretasi yang peneliti dapat sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Bank Indonesia dalam menyosialisasikan keuangan inklusif kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melibatkan perannya sebagai penyedia informasi dan fasilitator atau katalisator. Berikut adalah beberapa langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia:
2. Melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan UMKM serta memilih program keuangan inklusif yang sesuai dan tepat. Tindakan ini merupakan langkah penting agar konten atau materi yang akan disampaikan oleh Bank Indonesia dapat sesuai dan mencapai sasaran dengan tepat.
3. Merencanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Perencanaan yang disiapkan secara sistematis ini memiliki dampak langsung terhadap hasil akhir.
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pelaku bisnis UMKM.
5. Memberikan penjelasan umum terkait keuangan inklusif kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat atau UMKM untuk memiliki pemahaman dasar tentang keuangan inklusif.
6. Peran Bank Indonesia dalam memberikan edukasi tentang keuangan inklusif kepada pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan sebagai penyedia pengetahuan dalam kegiatan sosialisasi keuangan inklusif. Berikut beberapa langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia:
 - a. Melakukan pembelajaran tentang keuangan inklusif sesuai dengan kebutuhan UMKM. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa edukasi yang disampaikan sesuai dan relevan dengan kebutuhan para pelaku UMKM.
 - b. Mendorong UMKM yang sebelumnya dianggap sulit mendapatkan dukungan perbankan agar dapat memenuhi syarat menjadi bankable. Dengan demikian, diharapkan UMKM yang sebelumnya belum memiliki rekening dapat membuka rekening setelah menyadari pentingnya memiliki rekening bagi pelaku bisnis UMKM.
 - c. Memberikan edukasi tentang pengelolaan uang remitansi, dengan tujuan mengubah pola konsumtif menjadi pola produktif, sehingga uang yang diterima dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.

- d. Mendorong para pelaku UMKM agar mengubah pola pikir mereka, sehingga tidak ragu untuk menggunakan layanan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga perbankan.
7. Peran Bank Indonesia dalam melakukan pemantauan terkait keuangan inklusif untuk pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah melibatkan fungsi sebagai entitas yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari kegiatan sosialisasi hingga edukasi. Berikut beberapa tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia:
- a. Membangun jejaring untuk memastikan implementasi keuangan inklusif dalam kegiatan bisnis yang dijalankan oleh UMKM.
 - b. Menyelenggarakan pendampingan yang berkelanjutan untuk UMKM, memungkinkan Bank Indonesia untuk terus memantau perkembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM.
 - c. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan, memastikan bahwa UMKM merasa mendapatkan perhatian yang baik dari Bank Indonesia.
 - d. Menjadi bahan pemantauan dan evaluasi bagi Bank Indonesia dalam upaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM.

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Jambi dalam penerapan keuangan inklusif Pada UMKM Jambi adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan sosialisasi terkait keuangan inklusif kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melibatkan perannya sebagai penyedia informasi dan fasilitator atau katalisator.
 - b) Memberikan edukasi tentang keuangan inklusif kepada pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan sebagai penyedia pengetahuan dalam kegiatan sosialisasi keuangan inklusif.
 - c) Melakukan pemantauan terkait keuangan inklusif untuk pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah melibatkan fungsi sebagai entitas yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari kegiatan sosialisasi hingga edukasi.

2. Kendala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Jambi dalam penerapan keuangan inklusif Pada UMKM Jambi adalah sebagai berikut :
 - a. Hambatan dalam melaksanakan sosialisasi terletak pada ketidakmerataan jangkauan atau aksesibilitasnya.
 - b. Hambatan lain dalam kegiatan sosialisasi melibatkan dua aspek, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi faktor utama, dan pemahaman terhadap audiens. Meskipun demikian, kendala ini tidak terlalu sulit karena sudah ada kebiasaan dan tata kelola yang terstruktur.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Indonesia

Bank Indonesia bisa meningkatkan skala operasionalnya dengan memperkuat penyerapan akses edukasi keuangan inklusif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat membantu meningkatkan lapangan kerja, sehingga individu yang terlibat dalam UMKM dapat mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, yang pada gilirannya dapat secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, Bank Indonesia juga perlu memberikan pendampingan yang kuat dalam mengelola operasional usaha dan terlibat aktif dalam pemantauan untuk memastikan bahwa UMKM yang menerima bantuan pembiayaan mampu mengelola keuangan mereka dengan efektif.

2. Bagi UMKM

UMKM diharapkan dapat berperan sebagai perpanjangan tangan dalam mengenalkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat umum (non-UMKM) agar terlibat dalam kegiatan usaha yang melibatkan lembaga keuangan formal. Pada umumnya, masyarakat umum ini mungkin kurang memiliki kreativitas sehingga mereka kesulitan dalam mengelola sumber daya mereka untuk menambah nilai tambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan. Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial Lainnya. Cetakan 9. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hanif, Mohammad. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jakarta, 2016.
- Hanim, Lathifah, dan MS Noorman. UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha. Semarang: UNNISULA Press, 2018.

- Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Cetakan 13. Edisi Satu. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2016.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya, dan I Putu Nuratama. *Tata kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Cetakan Pertama. Kab. Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Afiyanti Y. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. *J Keperawatan Indonesia*. 2008;12 (2):137–141.
- Aribawa, Dwitya. “Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah.” *Jurnal Siasat Bisnis* 20, no. 1 (2016): 1–13.
- Husni, M. Ag. “Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe Terhadap Pemberdayaan Umkm,” T.T.
- Irmawati, Setyani, Delu Damelia, dan Dita Wahyu Puspita. “Model inklusi keuangan pada UMKM berbasis pedesaan.” *JEJAK* 6, no. 2 (2013).
- Kaplan, Robert S. *The balanced scorecard measures that drive performance*. Harvard business review, 1992.
- Latifiana, Dwi. “Studi literasi keuangan pengelola usaha kecil menengah (UKM).” Dalam *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3, 2017.
- Nasution, Lia Nazliana, Pipit Buana Sari, dan Handriyani Dwilita. “Determinan Keuangan Inklusif Di Sumatera Utara, Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 14, no. 1 (2013): 58–66.
- Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah) Diakses 19 Juli 2023.
- Putro, Dita Riyanto, dan Eka Askafi. “Pola Pembinaan Bank Indonesia Terhadap UMKM Di Kota Kediri.” *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2 (2020): 153–71.
- Rifa’i, Achmad. “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM.” *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2017).

- Rohmayanti, Siti Alfia Ayu. “Kajian Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah Binaan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Timur.” Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Agency, ANTARA News. “Provinsi Jambi dorong perkembangan UMKM melalui sinkronisasi program pemberdayaan.” ANTARA News Jambi. Diakses 17 Juli 2023. <https://jambi.antaranews.com/berita/492941/provinsi-jambi-dorong-perkembangan-umkm-melalui-sinkronisasi-program-pemberdayaan>.
- Badan Kebijakan Fiskal - Keuangan Inklusif.” Diakses 16 Juli 2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-inklusif>.
- Badan Pusat Statistik.” Diakses 17 Juli 2023. <https://jambi.bps.go.id/indicator/35/840/1/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html>.
- Bank Indonesia.” Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 9 November 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Indonesia&oldid=24755966.
- Bulan Inklusi Keuangan: Wujudkan Akses Keuangan Untuk Semua .:: SIKAPI ::.” Diakses 19 Juli 2023. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10532>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 20 Tahun 2008.” Diakses 19 November 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.
- Indonesia, Bank. “Data Wirausaha Unggulan Bank Indonesia KPw Jambi,” 2020 2018.
- “Indonesia Beli Saham DJB.” Diakses 19 November 2023. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Indonesia-Beli-Saham-DJB.aspx>.
- Keuangan Inklusif.” Diakses 19 Juli 2023. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>.
- Online, Hukum. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline.” hukumonline.com. Diakses 19 November 2023. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/335/undangundang-nomor-23-tahun-1999>.
- Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Diakses 17 Juli 2023.
- Prima, Jambi. “21.186 UMKM Di Kota Jambi Bergerak Di Bidang Kuliner - Jambi Prima - Info Terbaru Dan Terpercaya.” jambiprima.com. Diakses 20 November 2023. [https://jambiprima.com/read/2022/12/30/16208/21186-umkm-di-kota-jambi-bergerak-di-bidang-kuliner-](https://jambiprima.com/read/2022/12/30/16208/21186-umkm-di-kota-jambi-bergerak-di-bidang-kuliner-.). Profil.” Diakses 19 November 2023. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/default.aspx>.

Sistem Keuangan Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Diakses 19 Juli 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3117/sistem-keuangan-inklusif-untuk-kesejahteraan-masyarakat>.

Undang-Undang BI.” Diakses 19 November 2023. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/default.aspx>.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.” Diakses 19 November 2023. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.

Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2013.

UU No. 23 Tahun 1999.” Diakses 19 November 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45332/uu-no-23-tahun-1999>.

Asha. Wawancara Bersama Pelaku UMKM Tentang Sosialisasi BI Terkait Keuangan Inklusif, Pada Oktober 2023.

Faraira, Evan. Wawancara selaku Unit Pengelolaan Uang Rupiah & Keuangan Inklusif Tentang Sosialisasi Keuangan Inklusif, 1 November 2023.

Fareira, Ervan. Penerapan Inklusif Keuangan, 10 September 2022.

Mega. Wawancara Bersama Pelaku UMKM Kota Jambi Tentang Edukasi Keuangan Inklusif, 1 November 2023.

Novita, Eka. Wawancara Bersama Pelaku UMKM Tentang Sosialisasi Keuangan Inklusif Bank Indonesia, Pada Oktober 2023.

Rifki. Wawancara Bersama Tim Departemen UMKM & Perlindungan Konsumen Bank Indonesia KPw Jambi, Oktober 2023.